Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam, Vol. 4 No. 1, Januari 2018: 31-40

Jurnal Ekononomi & Keuangan Islam

Available at http://journal.uii.ac.id/index.php/jeki

Efisiensi bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS) di provinsi Jawa Tengah

Mahmud Fauzi

BPRS Magirizki Bahagia Bantul, Yogyakarta, Indonesia

e-mail: uzi.fauzi83@gmail.com

Keywords:

Efficiency, BPRS, Central Java, Data Envelopment Analysis (DEA).

DOI:
10.20885/JEKI.vol4.iss1.art4

Abstract

This study analyzes the efficiency of BPRS in Central Java Province using DEA approach from 2012-2016. The object of this research is BPRS in Central Java Province consisting of 26 BPRS. This research uses secondary data derived from the financial statements of BPRS in the period of 2012-2016 which can be found from Bank Indonesia and OJK. This research is a quantitative research using non-parametric Data Envelopment Analysis (DEA). The results of this study indicate that from the analysis of BPRS efficiency annually, it can be seen that there are 5 BPRS which can perform efficiently for 5 years in a row, either in CCR or BCC model. Whereas from 26 BPRS in Central Java, there are about 21 BPRS which are inefficient either in solely one year or the whole five years. In addition to that, this study found that the cause of inefficiency in BPRS in Central Java is the use of input variables which is not at its maximum.

Abstrak

Penelitian ini menganalisa efsiensi BPRS di Provinsi Jawa Tengah dengan Pendekatan DEA dari tahun 2012-2016.Obyek penelitian ini adalah seluruh BPRS di Provinsi Jawa tengah yang terdiri dari 26 BPRS.Penelitian ini menggunakan data sekunder yang berasal dari laporan keuangan BPRS pada periode 2012-2016 dan bersumber dari Bank Indonesia dan OJK. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif dengan non-parametrik Data Envelopment Analysis (DEA). Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dari analisa efisiensi BPRS pada setiap tahunnya, dapat diketahui bahwa ada 5 BPRS yang dapat melakukan efisiensi selama 5 tahun berturut-turut, baik secara model CCR ataupun BCC. Sedangkan dari 26 BPRS yang ada di Jawa Tengah, terdapat 21 BPRS yang Inefisien baik itu hanya satu tahun ataupun lima tahun. Selain itu, yang menjadi sumber inefisiensi pada BPRS di Jawa Tengah adalah penggunaan variabel input yang kurang maksimal.

Pendahuluan

Pertumbuhan perekonomian Indonesia berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2017 menunjukan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional tumbuh sebesar 5,07 persen. Angka tersebut lebih tinggi jika dibandingkan dengan pertumbuhan pada tahun 2016 yaitu sebesar 5,03 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Lapangan Usaha Informasi dan Komunikasi sebesar 9,81 persen. Dari sisi pengeluaran pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 9,09 persen (BPS, 2018).

Indonesia dapat menjaga pertumbuhan ekonomi dalam negeri, dikarenakan banyaknya jumlah porsi konsumsi rumah tangga. Jika dilihat pada 2017 kemarin, jumlah konsumsi rumah tangga menyumbang kontribusi terbesar pada struktur Produk Domestik Bruto (PDB) yang mencatatkan pertumbuhan sebesar 4,95 persen (yoy). Porsinya pada pertumbuhan masih mencapai 56,13 persen. (Republika, 2018). Pengeluaran konsumsi masyarakat tersebut, salah satunya disumbang oleh Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang bergerak pada usaha atau jasa, makanan dan minuman, hotel dan restoran, transportasi dan komunikasi, pendidikan, dan perlengkapan rumah tangga. Oleh karena itu, pertumbuhan UMKM pada kondisi ekonomi global seperti sekarang ini menjadi sangat penting, maka pemerintah perlu mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang dapat membantu majunya dan berkembangnya UMKM.

Untuk mengembangkan sebuah UMKM agar tetap maju dan berkembang, lembaga keuangan khususnya perbankan harus ikut serta berperan aktif dalam membantu UMKM. Pemberian akses kredit atau pembiayaan yang mudah, kecilnya bunga atau margin, bagi hasil, dan pendampingan usaha dapat dilakukan oleh perbankan untuk mendukung berkembangnya UMKM tersebut. Karena kita ketahui bahwa selama ini perbankan mempunyai peran yang signifikan terhadap perkembangnya UMKM di Indonesia.

Dalam memberikan pembiayaan, BPRS mempunyai peran yang cukup berpengaruh terhadap perkembangan Usaha Mikro, dan Kecil (UMK) baik di daerah pedesaan maupun di daerahperkotaan. Seperti yang

diungkapkan oleh Septianto & Widiharih (2010) bahwa BPR memiliki prosedur pelayanan yang sederhana, proses yang cepat dan skema kredit yang mudah disesuaikan serta lokasi yang tersebar di daerah perkotaan maupun pedesaan. Hal ini berbeda dengan bank umum yang hanya memberikan pembiayaan baku (tidak dapat disesuaikan) serta lokasinya yang hanya terdapat diperkotaan.

Menurut Prasetyoningrum (2009) BPRS merupakan lembaga keuangan yang berbentuk bank dengan sistem operasionalnya berdasarkan prinsip syariah. Pada sistem perbankan Nasional, BPRS hanya terfokus pada melayani Usaha Mikro, dan Kecil (UMK) yang memiliki proses mudah, pelayanan cepat, dan persyaratan mudah (Bank Indonesia, 2008). Hal-hal semacam inilah yang kemudian membuat BPRS mempunyai pangsa pasar yang berbeda dengan Bank Syariah dan lembaga keuangan lainnya.

Efisiensi pada perbankan merupakan alat ukur dalam menentukan apakah perbankan tersebut mengalami suatu kinerja yang maju atau mundur. Jika perbankan mempunyai tingkat efisiensi yang maksimal, maka perbankan tersebut dapat dikatakan mengalami kinerja yang baik atau mengalami kemajuan dan sebaliknya. Secara sederhana dengan melihat Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO), maka dapat melihat apakah bank tersebut efisien atau tidak. Jika biaya operasi lebih besar dari pada pendapatan operasi, maka bank tersebut mengalami performa atau kinerja yang kurang baik atau tidak efisien.

Pada saat ini, perkembangan BPRS dari tahun ke tahun mengalami tingkat efisien yang cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari rasio Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) yang ada pada laporan tahunan perbankan Indonesia tahun 2017. Menurut laporan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), rasio BOPO BPRS pada tahun 2016 mengalami kenaikan menjadi naik 87,09% dibandingkan dengan tahun 2015 yaitu sebesar 88,09% (OJK, 2017).

Sebagai objek penelitian, provinsi Jawa Tengah memiliki beberapa keunggulan, seperti tempat wisata, banyaknya industri, perdagangan, ataupun Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Namun jika dilihat dari perkembangan BPRS di Provinsi Jawa Tengah, tampak bahwa di Provinsi Jawa Tengah mempunyai asset, pembiayaan, DPK, FDR, dan NPF yang cukup baik jika dibandingkan dengan daerah-daerah di pulau Jawa lainnya.

Efisiensi BPRS pada penelitian kali ini menggunakan metode *Data Envelopment Analysis* (DEA). Obyek penelitian merupakan BPRS di Provinsi Jawa tengah. Jumlah BPRS yang berada di Jawa Tengah pada saat sekarang ini ada 26 BPRS. Melalui penelitian ini, diharapkan mampu menjawab permasalahan BPRS yang ada di Jawa Tengah dan memperoleh gambaran seberapa efisien, serta bagaimana meningkatkan efisiensi BPRS di Jawa Tengah. Sehingga penelitian ini mengambil judul analisis efisiensi BPRS Provinsi Jawa Tengah dengan pendekatan *data envelopment analisys* (DEA).

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 bahwa BPR adalah lembaga bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan/atau dalam bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Sedangan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor Republik Indonesia 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan menyebutkan bahwa BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Pada perkembangannya, Pemerintah pada 16 Juli 2008 mengesahkan Undang-Undang yang kemudian merubah nama Bank Perkreditan Rakyat menjadi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Untuk menunjang kinerja BPRS, salah satu tolok ukur kinerjanya adalah dengan mengukur tingkat efisiensinya. Efisiensi merupakan salah satu parameter untuk mengukur kinerja suatu perusahaan atau organisasi yang mengacu pada kemampuan menghasilkan output secara maksimal dengan input yang ada. Menurut Huri dan Susilowati (2004) dan Hartono et al (2008) mengungkapkan bahwa efisiensi dapat didefinisikan sebagai perbandingan antara keluaran (output) dengan masukan (input), atau jumlah keluaran yang dihasilkan dari satu input yang dipergunakan. Pengukuran efisiensi merupakan salah satu aspek untuk memeriksa kinerja suatu perusahaan. Efisiensi tersebut dapat diukur dalam tiga cara, memaksimalkan output, meminimalisasi biaya, dan memaksimalisasi keuntungan (Mokhtar, 2008). Dengan demikian adanya pemisahan antara input dengan output dapat dijadikan untuk mengidentifikasi berapa tingkat efisiensi teknologi, efisiensi alokasi, dan total efisiensi. Pada penelitian kali ini, mencoba memberikan masukan untuk melakukan efisiensi dengan meminimalkan input.

Menurut Abidin & Endri (2009) menyatakan bahwa efisiensi sebuah perusahaan terdiri dari dua komponen, yaitu efisiensi teknis *(technical efficiency)* dan efisiensi alokatif *(allocative efficiency)*. Efisiensi teknis menunjukan kemampuan perusahaan untuk mencapai output semaksimal mungkin dari jumlah input. Sedangkan efisiensi alokatif menunjukan kemampuan perusahaan untuk menggunakan input dengan proporsi seoptimal mungkin pada tingkat harta input tertentu. Kedua komponen ini kemudian dikombinasikan untuk menghasilkan ukuran efisiensi total atau efisiensi ekonomis *(economic efficiency)*.

Penelitian mengenai efisiensi lembaga keuangan telah dilakukan sebelumnya. Ascarya dan Yumanita (2006) mengukur efesiensi relatif perbankan syariah di Indonesia dengan menggunakan metode nonparametrik *Data Envelopment Analysis* (DEA) dengan pendekatan produksi dan intermediasi, serta mengidentifikasi

penyebab inefisiensi.Hasil dari penelitian ini yaitu sebagian besar bank syariah yang diobservasi relatif efisien secara teknis (dengan model BCC) dari pendekatan intermediasi (100%) dan *produksi* (85%) pada tahun 2004. Demikian juga, bank syariah relatif efisien secara skala dari pendekatan intermediasi (87%) dan produksi (97%). Efisiensi teknis hanya merupakan satu komponen dari efisiensi ekonomi secara keseluruhan. Namun, dalam rangka mencapai efisiensi ekonominya suatu perusahaan harus efisiensi secara teknis. Dalam rangka mencapai tingkat keuntungan yang maksimal, sebuah perusahaan harus memproduksi output yang maksimal dengan jumlah input tertentu dan memproduksi output dengan kombinasi yang tepat dengan tingkat harga tertentu.

Jemric &Vujic (2002) mengukur efisiensi relatif dari bank-bank di Kroasia yang didasarkan pada ukuran bank, struktur kepemilikan, tahun berdiri, dan kualitas aset pada periode 1995-2000.Dari penelitian yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa bank-bank milik asing rata-rata efisiensi paling tinggi. Di samping itu, juga ditemukan bahwa bank-bank yang beroperasi ternyata lebih efisien dari pada bank-bank yang sudah lama beroperasi. Sementara dilihat dari ukurannya, bank-bank kecil lebih efisien dari pada bank-bank besar. Studi ini juga menunjukan bahwa bank-bank swasta lebih efisien dari pada bank milik pemerintah, sedangkan bank-bank asing lebih efisien dari pada bank lokal. Sehingga kebijakan melakukan privatisasi dan mengizinkan bank asing untuk masuk adalah kebijakan yang tepat.

Dari beberapa penelitian mengenai efisiensi perbankan di beberapa lembaga keuangan tersebut, menarik untuk diteliti bagaimana efisiensi pada lemabaga yang berfokus pada pembiayaan syariah. Dimana lembaga keuangan syariah dituntut untuk lebih efisien dalam melaksanakan operasionalnya.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif dengan non-parametrik *Data Envelopment Analysis* (DEA). Obyek penelitian adalah 26 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yang berada di Provinsi Jawa tengah. Dalam hal ini metode DEA mengukur efisiensi secara relatif dari *Decision Making Unit* (DMU) yang dianalisis. Tidak ada batasan minimal jumlah DMU yang harus dianalisis. Akan tetapi, biasanya lebih dari lima unit supaya terhindar dari *self indertifer*.

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersumber dari Bank Indonesia dan Otoritas jasa Keuangan (OJK). Data pada penelitian ini berasal dari laporan keuangan BPRS yaitu Neraca dan Laporan Laba/Rugi pada periode 2012-2016. Secara spesifik, sumber data yang diperoleh adalah sebagai berikut :

Tabel 1. Spesifikasi Sumber Data

Input	**Definisi**	**Sumber**
X_1	Dana pihak ketiga	Neraca
X_2	Beban Operasional	Lap. Laba/Rugi
X_3	Aktiva Tetap	Neraca
Output	**Definisi**	**Sumber**
Q_1	Pembiayaan	Neraca
Q_2	Pendapatan Operasional	Lap. Laba/Rugi
Q_3	Aktiva lancar	Neraca

Pada penelitian ini, metodologi yang digunakan adalah *Data Envelopment Analysis* (DEA) dengan menggunakan *software Banxia – Frontier Analyst Profesional.* Kelebihan metode ini yaitu mempunyai beberapa keuntungan relatif dibandingkan dengan teknik parametrik. Dalam mengukur efisiensi, DEA mengidentifikasi aktiva lancar unit yang digunakan sebagai refrensi yang dapat membantu untuk mencari penyebab dan jalan keluar dari ketidakefisienan. (Kuah et al, 2010). Selain itu, DEA tidak memerlukan spesifiaktiva lancari yang lengkap dari bentuk fungsi yang menunjukan hubungan produksi dan distribusi dari observasi. Selain itu pendekatan parametrik sangat tergantung pada asumsi mengenai data produksi dan distribusi (Hadad et al., 2003).

Metode *Data Envelopment Analysis* (DEA) adalah sebuah metode *frontier* non parametrik yang menggunakan model progam linear untuk menghitung perbandingan rasio output dan input untuk semua unit yang dibandingkan dalam sebuah populasi. Tujuan dari metode DEA adalah untuk mengukur tingkat efisiensi dari *Decision-Making Unit* (DMU) relatif terhadap bank yang sejenis ketika semua unit-unit ini berada pada atau dibawah kurva efisien frontier-nya. Jadi metode ini digunakan untuk mengevaluasi efisiensi relatif dari beberapa obyek (benchmarking kinerja) (Abidin & Endri, 2009).

DEA mengukur efisiensi relatif bank kepada bank lain yang sejenis dengan sebuah batasan bahwa semua bank berada pada batasan yang efisien. Pembatasan dibangun pada non-statistik atau non-parametrik, yang itu dibangun dari pengambilan keputusan DMU yang terbaik (Qureshi & Shaihk, 2012). Dalam analisis DEA dimungkinkan beberapa unit mempunyai tingkat efisiensi 100% yang artinya adalah bahwa unit tersebut merupakan unit yang terefisien dalam satu set data tetentu dan waktu tertentu.

Data Envelopment Analysis (DEA) pertama kali dikenalkan oleh Charnes, Cooper & Rhodes pada tahun 1978 dan 1979. Semenjak itu pendekatan dengan menggunakan DEA ini banyak digunakan di dalam penelitian-penelitian operasional dan ilmu manajemen. Pendekatan DEA lebih menekankan pendekatan yang berorientasi kepada tugas dan lebih memfokuskan kepada tugas yang penting, yaitu mengevaluasi kinerja dari unit pembuat keputusan (UPK) (decision making units). Analisis yang dilakukan berdasarkan kepada evaluasi terhadap efisiensi relatif dari UPK yang sebanding. Selanjutnya UPK-UPK yang efisien tersebut akan membentuk garis frontier. Jika UPK berada pada garis frontier, maka UPK tersebut dapat dikatakan efisien relatif dibanding dengan UPK yang lain dalam per-group-nya. Selain menghasilkan nilai efisiensi masing-masing UPK, DEA juga menunjukan unit-unit yang menjadi refrensi bagi init-unit yang tidak efisien (Ascarya dan Yumanita, 2006)

Secara sederhana, Efisiensi dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$Efficiency\ of\ DMU = \frac{\sum_{k=1}^{p} \mu_k\, y_{k0}}{\sum_{i=1}^{m} v_i x_{i0}}$$

Dimana DMU = UPK, n = UPK yang akan dievaluasi; m = input-input yang berbeda; p = output-output yang berbeda; X_{ij} = jumlah input I yang di konsumsi oleh UPKj; ykj = jumlah output k yang diproduksi oleh UPKj.

Nilai efisien dalam DEAberkisar antara nol sampai satu. DMU yang efisien akan memiliki nilai 1 atau 100%, sedangkan nilai yang mendekati nol menunjukan efisiensi DMU yang semakin rendah. Ada dua kriteria sebuah DMU yang efisien yaitu : pertama, apabila tidak ada unit lain atau kombinasi DMU yang menggunakan jumlah input sama. Kedua, jumlah output yang dihasilkan sedikitnya sama dengan jumlah output yang dihasilkan oleh DMU lain yang berkinerja 100% (Abidin & Endri, 2006).

Hasil dan Pembahasan

Penelitian ini dilakukan terhadap seluruh BPRS yang berada di Provinsi Jawa Tengah. Adapun rentan waktu penelitian yaitu dari tahun 2012 sampai tahun 2016. Berdasarkan data yang didapat dari Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2012 hanya terdapat 23 BPRS. Kemudian pada tahun 2013 terdapat 24 BPRS, tahun 2014 terdapat 25 BPRS dan pada tahun 2015 dan 2016 masing masing terdapat 26 BPRS. Jadi secara keseluruhan untuk Decision Making Unit (DMU) yang di analisis berjumlah 124 DMU.

Hasil pengolahan data laporan keuangan BPRS di Jawa Tengah pada tahun 2012 dengan jumlah DMU sebanyak 23 DMU, menunjukkan bahwa efisiensi dengan model constant return to scale (CCR) ada 7 dari 23 DMU (30,43%) yang mengalami efisien, sedangkan 16 dari 23 DMU (69,57%) lainnya belum mengalami efisiensi. Pada efisiensi dengan model variabel return to scale (BCC) menunjukkan bahwa ada 14 dari 23 DMU (61%) yang mengalami efisien, sedangkan 9 dari 23 DMU (39%) belum mengalami efisiensi. Hal tersebut menunjukkan bahwa Rata-rata BPRS di Jawa tengah masih belum menjalankan fungsi intermediasi dengan optimal, sehingga perlu melihat keadaan pasar atau keadaan ekonomi yang lebih baik lagi. Akan tetapi rata-rata BPRS di Jawa Tengah sudah menjalankan pelayanan dan kinerja perbankan kepada masyarakat dengan sangat baik.
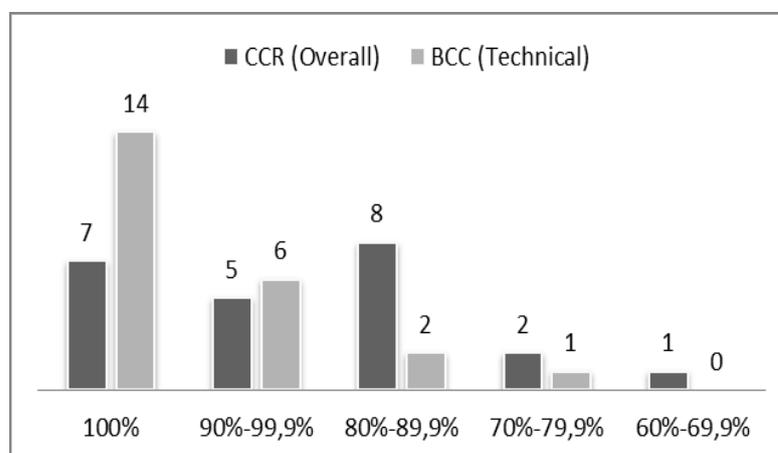
Gambar 1. Efisiensi BPRS di Jawa tengah Tahun 2012

Pada tahun 2012 ini ada beberapa sumber variabel yang menyebabkan BPRS mengalami inefisiensi dan ada beberapa variabel yang dapat di tingkatkan potensinya agar dapat menjadi efisien. Pada penelitian di tahun 2012 agar BPRS dapat menjadi efisien, maka dari variabel input seperti Dana Pihak Ketiga (DPK) dapat di kurangi sebesar 12,32%, karena dengan adanya DPK yang berlebih membuat BPRS harus memberikan dananya untuk bagi hasil dan bonus bagi nasabah. Kemudian pada Beban Operasional dapat dikurangi sebesar 12,32%, karena beban biaya untuk keperluan operasional sangatlah tinggi, sehingga perlu penghematan atau pemaksimalan sumber daya yang ada. Dan untuk Aktiva Tetap dapat dikurangi sebesar 29,11%, karena aset-aset yang ada, tidak memberikan keuntungan yang signifikan bagi BPRS.
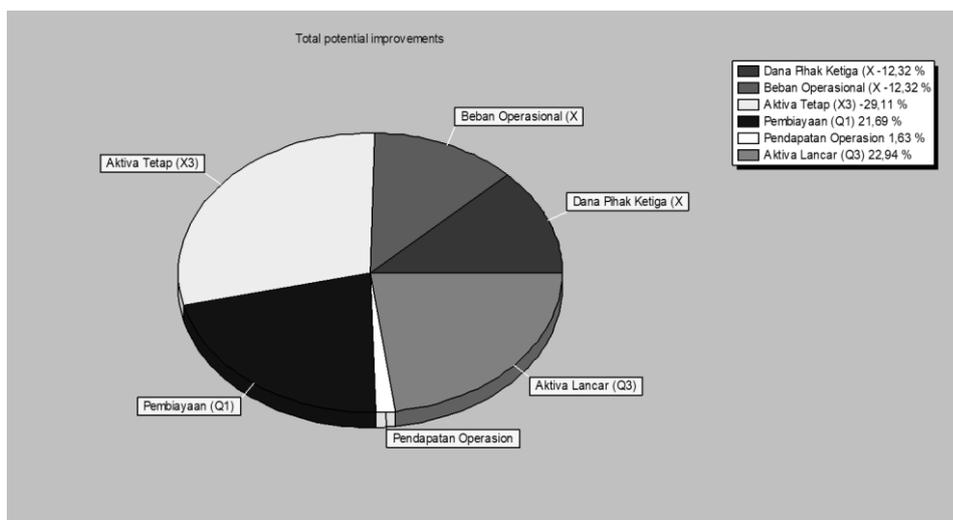
Gambar. 2. Potential Improvment BPRS pada Tahun 2012

Dari hasil penelitian BPRS di Jawa Tengah pada tahun 2013 mengalami penurunan kinerja, yaitu dengan jumlah 24 DMU, menunjukkan bahwa efisiensi dengan model constant return to scale (CCR) ada 11 dari 24 DMU (45,83%) yang mengalami efisien, sedangkan 13 dari 24 DMU (54,17%) lainnya belum mengalami efisiensi. Pada efisiensi dengan model variabel return to scale (BCC) menunjukkan bahwa ada 15 dari 24 DMU (62,50%) yang mengalami efisien, sedangkan 9 dari 24 DMU (37,50%) belum mengalami efisiensi. Hal tersebut menunjukkan bahwa rata-rata BPRS di Jawa Tengah belum menjalankan fungsi intermediasi secara optimal, sehingga perlu meningkatkan kinerja dengan memperhatikan keadaan pasar atau keadaan ekonomi dengan lebih baik lagi. Akan tetapi sudah menjalankan pelayanan dan kinerja perbankan kepada masyarakat dengan sangat baik.
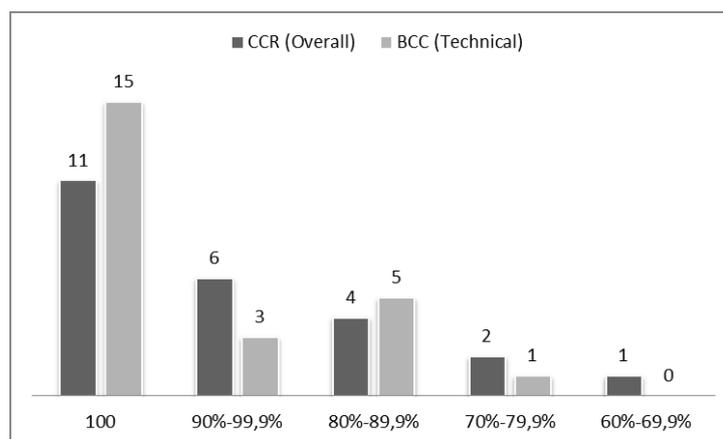
Gambar 3. Efisiensi BPRS di Jawa tengah Tahun 2013

Pada penelitian di tahun 2013 agar BPRS dapat menjadi efisien, maka dari variabel input seperti Dana Pihak Ketiga (DPK) dapat di kurangi sebesar 14,66%, karena dengan besarnya DPK tentunya akan membuat pengembalian bonus dan bagi hasil yang besar pula jika tidak didukung dengan variabel lainnya. Kemudian Beban Operasional dapat dikurangi sebesar 18,52%, karena beban operasional yang ada sangat membebani BPRS

sehingga membuat BPRS menjadi inefisien. Selain itu, Aktiva Tetap juga dapat dikurangi sebesar 29,4%, hal ini dikarenakan aktiva tetap seperti kantor, kendaraan, dan aset lainnya tidak memberikan timbal balik atau keuntungan yang signifikan bagi BPRS.
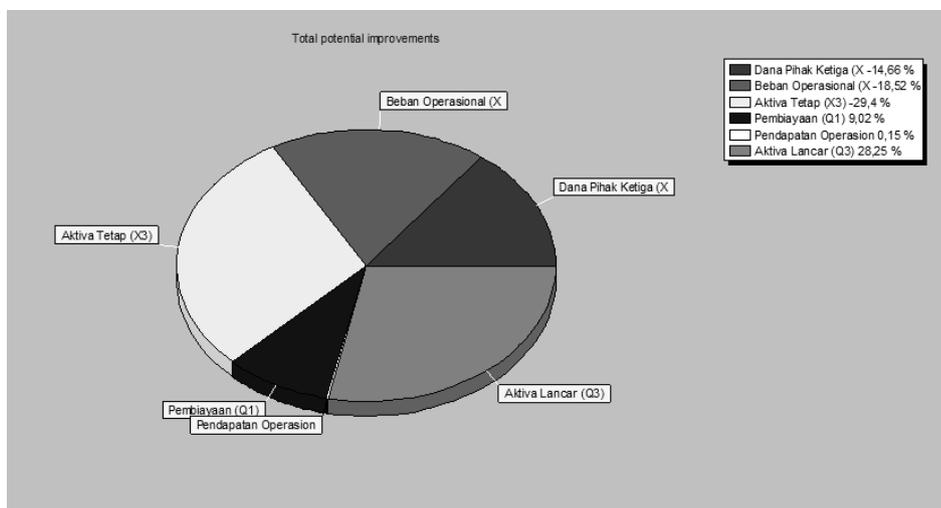
Gambar 4. Potential Improvment BPRS pada Tahun 2013

Untuk hasil penelitian BPRS di Jawa Tengah pada tahun 2014 mengalami kinerja yang semakin baik, karena dengan jumlah 25 DMU, dengan model Constant Return to Scale (CCR) ada 15 dari 25 DMU (60%) yang mengalami efisien, sedangkan 10 dari 25 DMU (40%) lainnya belum mengalami efisiensi atau inefisien. Pada efisiensi dengan model variabel return to scale (BCC) menunjukkan bahwa ada 15 dari 25 DMU (60%) yang mengalami efisien, sedangkan 10 dari 25 DMU (40%) belum mengalami efisiensi. Hal tersebut menunjukkan bahwa rata-rata BPRS di Jawa Tengah sudah menjalankan fungsi intermediasi dan pelayanan serta kinerja perbankan kepada masyarakat dengan sangat baik.
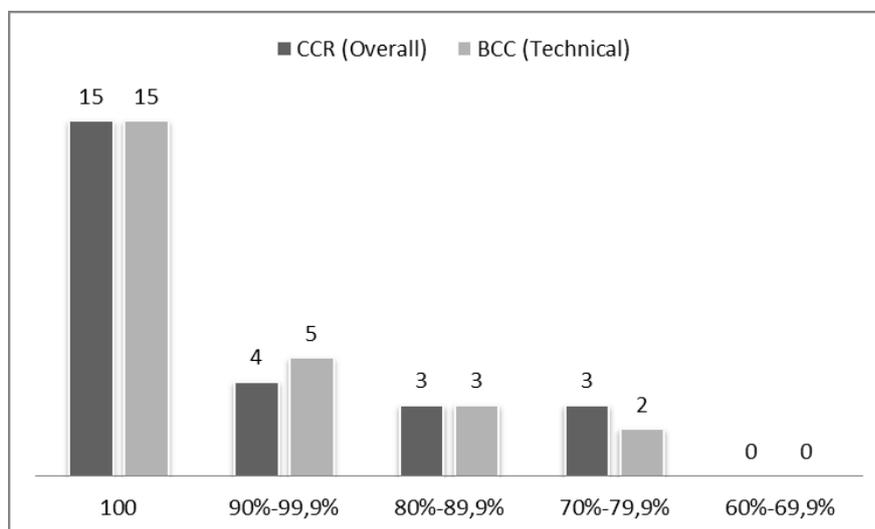
Gambar 5. Efisiensi BPRS di Jawa tengah Tahun 2014.

Hasil pengolahan data keuangan BPRS pada tahun 2014 menunjukkan ada beberapa potential improvment agar BPRS dapat menjadi efisien, maka dari variabel input seperti Dana Pihak Ketiga (DPK) dapat di kurangi sebesar 20,09%, Beban Operasional dapat dikurangi sebesar 17,05%, dan Aktiva Tetap dapat dikurangi sebesar 36,37%. Kemudian dari variabel output, dari segi Pembiayaan dapat ditingkat kan lagi sebesar 10,75%, Pendapatan operasional sebesar 1,85% dan aktiva lancar sebesar 13,1%. Total potential improvment untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini:
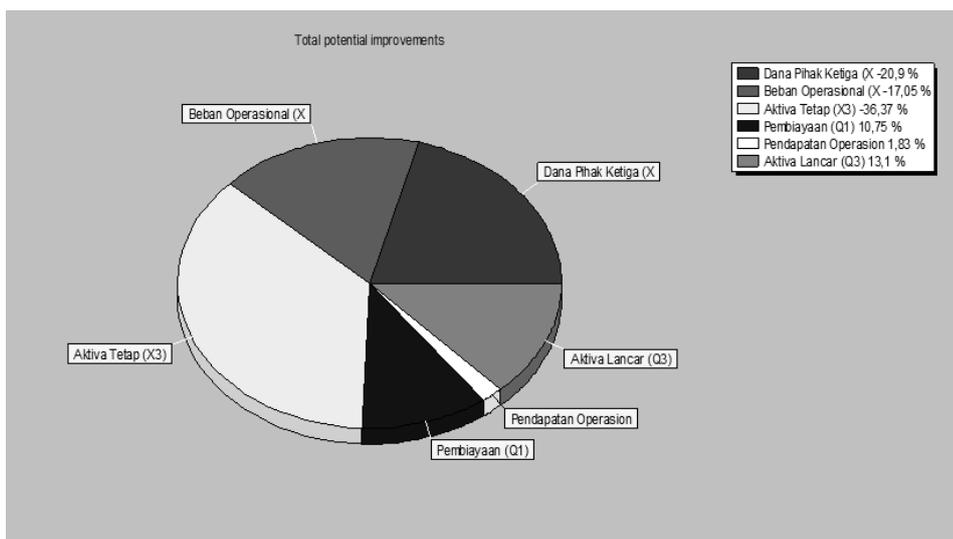
Gambar 6. Potential Improvment BPRS pada Tahun 2014

Hasil pengolahan data keuangan BPRS di Jawa Tengah pada tahun 2015 mengalami penurunan jumlah BPRS yang dapat berkerja secara efisien. Karena dengan jumlah 26 DMU, dengan model constant return to scale (CCR) ada 11 dari 26 DMU (42,31%) yang mengalami efisien, sedangkan 15 dari 26 DMU (57,69%) lainnya belum mengalami efisiensi.. Pada efisiensi dengan model variabel return to scale (BCC) menunjukkan bahwa ada 16 dari 26 DMU (61,54%) yang mengalami efisien, sedangkan 10 dari 26 DMU (38,46%) belum mengalami efisiensi. Hal tersebut menunjukkan bahwa rata-rata BPRS di Jawa Tengah pada tahun 2015 belum menjalankan fungsi intermediasi secara optimal, sehingga perlu meningkatkan kinerja dengan memperhatikan keadaan pasar atau keadaan ekonomi dengan lebih baik lagi, akan tetapi BPRS di Jawa Tengah sudah memberikan pelayanan dan melakukan kinerja perbankan kepada masyarakat dengan sangat baik.
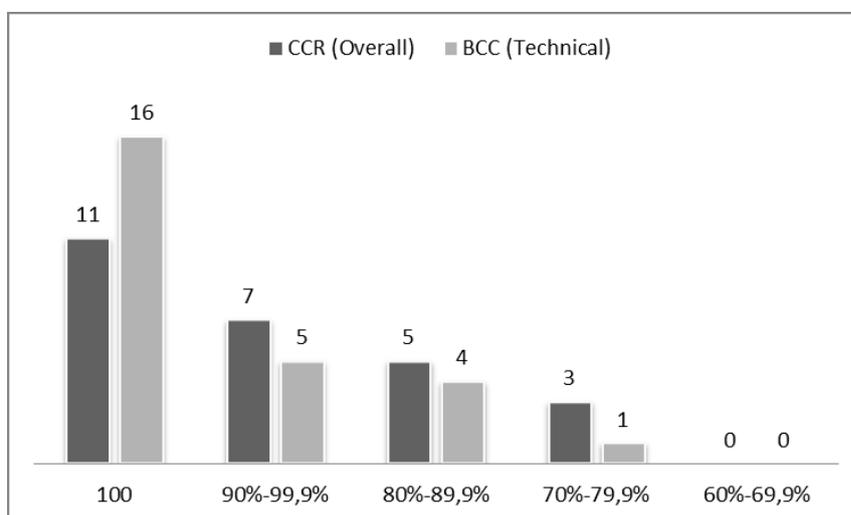
Gambar 7. Efisiensi BPRS di Jawa tengah Tahun 2015.

Hasil pengolahan data keuangan BPRS pada tahun 2015 menunjukkan ada beberapa potential improvment agar BPRS dapat menjadi efisien, maka potensi tersebut yaitu dari variabel input seperti Dana Pihak Ketiga (DPK) dapat di kurangi sebesar 18,19%, Beban operasional dapat dikurangi sebesar 13,46%, dan Aktiva tetap dapat dikurangi sebesar 41,49%. Kemudian dari variabel output, dari segi Pembiayaan dapat ditingkatkan lagi sebesar 9,27%, Pendapatan operasional sebesar 3,43% dan Aktiva lancar sebesar 14,16%. Total potential improvment untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini:
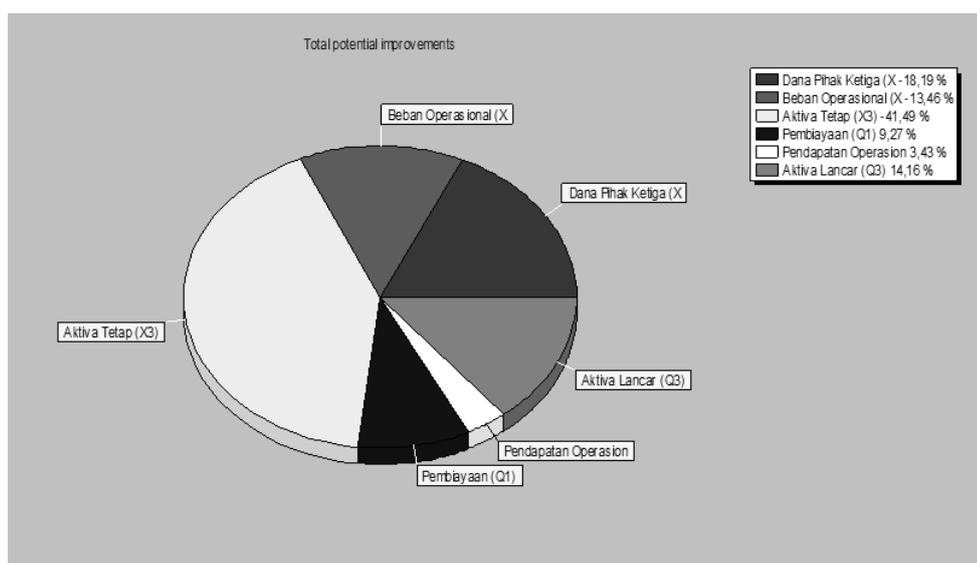
Gambar 8. Potential Improvment BPRS pada Tahun 2015

Dari hasil penelitian BPRS di Jawa Tengah pada tahun 2016 mengalami yang cukup baik. Karena dengan jumlah 26 DMU, dengan model constant return to scale (CCR) ada 11 dari 26 DMU (42,30%) yang mengalami efisien, sedangkan 15 dari 26 DMU (57,69%) lainnya belum mengalami efisiensi.. Pada efisiensi dengan model variabel return to scale (BCC) menunjukkan bahwa ada 17 dari 26 DMU (65,38%) yang mengalami efisien, sedangkan 9 dari 26 DMU (34,61%) belum mengalami efisiensi. Hal tersebut menunjukkan bahwa rata-rata BPRS di Jawa Tengah belum menjalankan fungsi intermediasi secara optimal, sehingga perlu meningkatkan kinerja dengan memperhatikan keadaan pasar atau keadaan ekonomi dengan lebih baik lagi, akan tetapi BPRS di Jawa tengah sudah menjalankan kinerja pelayanan dan kinerja perbankan kepada masyarakat dengan sangat baik.
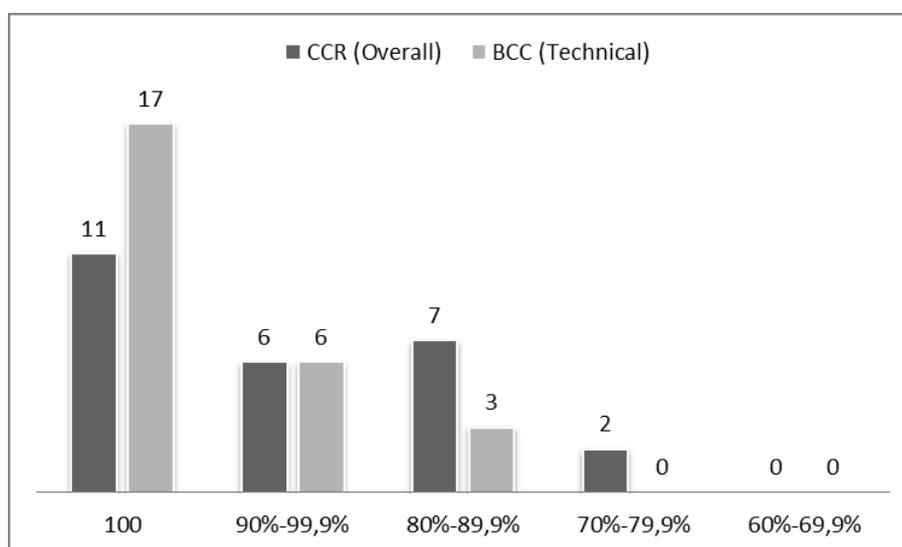
Gambar 9. Efisiensi BPRS di Jawa tengah Tahun 2016.

Pada penelitian di tahun 2016 agar BPRS dapat menjadi efisien, maka dari variabel input seperti Dana Pihak Ketiga (DPK) dapat di kurangi sebesar 15,14%, karena dengan DPK yang ada sekarang menjadikan BPRS tidak efisien atau kelebihan dana sehingga butuh pengembalian atau bagi hasil yang banyak juga. Beban operasional dapat dikurangi sebesar 8,1%, karena dengan beban operasionaldak efisen. Kemudian untuk aktiva tetap dapat dikurangi sebesar 37,35%, karena dengan aktiva tetap yang ada pada saat sekarang ini menjadikan BPRS tidak efisien.
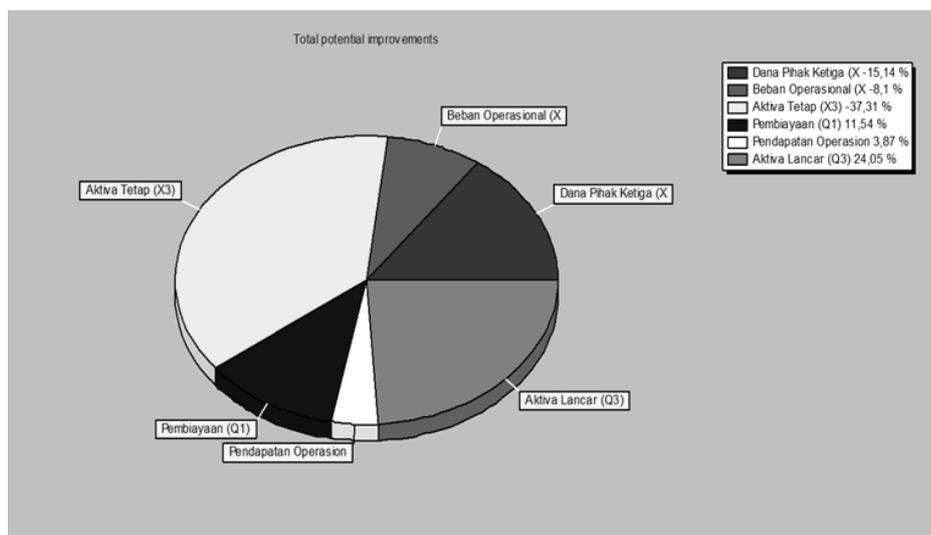
Gambar 10. Potential Improvment BPRS pada Tahun 2016

Dari analisa efisiensi BPRS pada setiap tahunnya, maka dapat diketahui bahwa ada 5 BPRS yang dapat melakukan efisiensi selama 5 tahun berturut-turut, baik secara model CCR ataupun BCC. 2 BPRS yaitu BPRS Artha Surya Barokah dan Gunung Slamet mampu menunjukan efisien dari 2012 sampai 2016. Sedangkan 3 BPRS baru yaitu BPRS Saka Dana Mulia, BPRS Harta Insan Karimah (HIK) Surakarta, dan BPRS Harta Insan Karimah (HIK) kota Tegal memulai efisiensi masing-masing pada tahun 2013, 2014, dan 2015.

Kemudian dari hasil pengolahan data laporan keuangan dari tahun 2012-2016, ada beberapa BPRS yang masih Inefisien. Dari 26 BPRS yang ada di Jawa Tengah, ada sekitar 21 BPRS yang Inefisien baik itu hanya satu tahun ataupun lima tahun. Namun pada kesempatan ini penulishanya mengambil tiga BPRS yang inefisiensi paling bawah. Adapun tiga BPRS tersebut adalah BPRS Bumi Artha Sampang, BPRS Al Mabrur, dan BPRS PNM Binama. Selan itu, dari hasil penelitian ini juga menunjukan bahwa rata-rata BPRS di Jawa Tengah masih belum bisa memaksimalkan input yang ada seperti Dana Pihak Ketiga (DPK), beban operasional, dan aktiva tetap, sehingga menjadikan kinerja BPRS menjadi kurang efisien.

Implikasi Manajerial

Pertama, dari sisi output. Untuk meningkatan BPRS agar tetap efisien perlu adanya peningkatan pada setiap tahunnya dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016. Pada pos pembiayaan, agar pada pos pembiayaan meningkat maka perlu adanya produk-produk pembiayaan yang inovatif yang hal tersebut menjadi daya tarik bagi masyarakat. Hal tersebut seperti pelayanan yang prima, promosi yang berkesinambungan, perluasan jangkauan dengan membuka kantor kas atau cabang, dan promo-promo lainnya. Kemudian pada pos pendapatan operasional, hal yang menjadi sumber peningkatan adalah pendapatan dari hasil penyaluran pembiayaan atau lebih dikenal dengan margin atau bagi hasil. Semakin margin atau bagi hasil yang bank dapat maka semakin besar pula pendapatan. Selain pendapatan margin atau bagi hasil, bank juga memiliki pendapatan dari penyediaan jasa, yaitu seperti jasa pembayaran (pulsa, listrik, PDAM, dll), jasa administrasi, dan jasa jasa lainnya. Selain itu, pada pos aktiva lancar, hal yang dapat meningkatkannya adalah dengan menaruh dananya dikas atau penempatan dana dibank lainnya yang sewaktu-waktu bisa di ambil.

Kedua, dari sisi input dapat dilakukan dengan menekan dana pihak ketiga, beban operasional atau biaya-biaya, dan aktiva tetap. Adapun beberapa cara yang dapat diambil untuk menekan input, cara tersebut adalah sebagai berikut : a). Untuk menekan biaya dana pihak ketiga, dapat dilakukan dengan cara meningkatkan kualitas pelayanan dan jasa perbankan. Hal tersebut dapat dilakukan dengan memberikan pelayanan dan jasa perbankan yang berbasis IT untuk mempertahankan dan meningkatkan dana pihak ketiga dengan tingkat bagi hasil simpanan yang wajar. b). Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) bagi BPRS dengan cara pengembangan atau pelatihan secara terarah dan teratur. Agar biaya pengembangan SDM tidak terlalu membebani operasional. Selain itu, BPRSjuga dapat bekerjasama dengan Bank Indonesia, OJK, Universitas, atau lembaga pendidikan lainnya yang mempunyai komitmen untuk pengembangan ekonomi syariah khusunya perbankan syariah. c). Sedangkan untuk aktiva tetap dapat ditekan dengan mengurangi aset-aset yang kurang produktif atau pengadaan kantor dengan sistem sewa.

Kesimpulan

Dari analisa efisiensi BPRS pada setiap tahunnya, dapat diketahui bahwa ada 5 BPRS yang dapat melakukan efisiensi selama 5 tahun berturut-turut, baik secara model CCR ataupun BCC. 2 BPRS yaitu BPRS Artha Surya Barokah dan Gunung Slamet mampu menunjukan efisien dari 2012 - 2016. Sedangkan 3 BPRS baru yaitu BPRS Saka Dana Mulia, BPRS Harta Insan Karimah (HIK) Surakarta, dan BPRS Harta Insan Karimah (HIK) Kota Tegal memulai efisiensi masing-masing pada tahun 2013, 2014, dan 2015.

Dari 26 BPRS yang ada di Jawa Tengah, ada sekitar 21 BPRS yang inefisien baik itu hanya satu tahun ataupun lima tahun. Terdapat tiga BPRS yang inefisien paling bawah, BPRS itu antara lain adalah BPRS Bumi Artha Sampang, BPRS Al Mabrur, dan BPRS PNM Binama.

Hasil analisa di atas juga menunjukan bahwa, sumber infisiensi pada BPRS di Jawa Tengah adalah penggunaan variabel input yang kurang maksimal. Seperti Dana Pihak Ketiga (DPK), beban operasional, dan aktiva tetap yang berlebih dan kurang maksimal dalam penggunaannya, sehingga menjadikan BPRS memiliki kinerja yang inefisien. Oleh karena itu, agar BPRS di Jawa Tengah mampu menjadi maka perlu untuk memaksimalkan variabel input yang ada.

Daftar Pustaka

Abidin, Z. & Endri, E. (2010). Kinerja Efisiensi Teknis Bank Pembangunan Daerah: Pendekatan Data Envelopment Analysis (DEA). *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, *11*(1), 21-29

Ascarya & Yumanita (2006). Analisis Efisiensi Perbankan Syariah di Indonesia dengan Data Envelopment Analysis. *Tazkia Islamic Finance and Business Review*, 1 (2), 1-27

Hadad, M. D., Santoso, W., Ilyas, D. & Eugenia, M. (2003). Analysis Efisiensi Industri Perbankan Indonesia: Penyusunan Metode Non Parametrik Data Envelopment Analysis (DEA). *Research Paper Biro Stabilitas Sistem KeuanganBank Indonesia,* 7 (5), 1-28

Huri, M. D. & Susilowati, I. (2004). Pengaruh Efisiensi Relatif Emiten Perbankan dengan Metode Data Envelopment Analysis (DEA). *Jurnal Dinamika Pembangunan*, 1 (2), 95-108

Hartono, I., Djohar, S., & Daryanto, H. K. (2008). Analisis Efisiensi Bank Perkreditan Rakyat di wilayah Jabodetabek dengan pendekatan data envelopment analysis. *Jurnal Manajemen & Agribisnis*, 5(2), 52-63.

Jemric, I., & Vujcic, B. (2002). Efficiency of Banks in Croatia: A DEA Approach. *Comparative Economic Studies*, 44(2-3), 169-193.

Kuah, Chuen Tse, Kuan Yew Wong, dan Farzad Behrouzi. (2010). *A Review on Data Envelopment Analysis (DEA). Artikel pada Fourth Asia International Conference on Mathematical/ Analytical Modelling and Computer Simulation,* Malaysia.

Mokhtar, H. S. A., Abdullah, N., & Alhabshi, S. M. (2008). Efficiency and Competition of Islamic banking in Malaysia. *Humanomics*, 24(1), 28-48.

Prasetyoningrum, A. K. (2012). Analisis Pengaruh Independensi dan Profesionalisme Dewan Pengawas Syariah terhadap Kinerja Bank Perkreditan Rakyat Syariah di Jawa Tengah. *Jurnal Ilmu Ekonomi ASET*, *12*(1), 75-86.

Qureshi, M. A., & Shaikh, M. (2012). Efficiency of Islamic and Conventional Banks in Pakistan: A Non-Parametric Approach. *International Journal of Business and Management*, 7(7), 40.

Septianto, H., & Widiharih, T. (2010). Analisis Efisiensi Bank Perkreditan Rakyat Di Kota Semarang Dengan Pendekatan Data Envolepment Analysis. *Media Statistika*, *3*(1), 41-48.